

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Perencanaan Tahun 2023-2026 merupakan periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2023-2026 bukan merupakan rencana atau janji kepala daerah terpilih. Hal ini disebabkan oleh telah berakhirnya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024, sesuai amanat Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemerintah Provinsi Banten belum mempunyai dokumen RPJMD yang baru.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai dokumen perencanaan strategis daerah selama periode tahun 2023- 2026.

Dalam periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, tahun 2023-2026 merupakan tahun pertama dari RPJMD ke-5, Tahun 2023-2025, yang merupakan tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, adalah “Banten

yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu : (1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas; (2) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan; (3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; (4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Tujuan yang tertuang dalam Renstra merupakan penjabaran atas ujuan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, yaitu:

1. *Misi ke-2*, Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan Tujuan misi ke-2 adalah Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.
2. *Misi ke-4* yaitu *Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa*, dengan tujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 4.1.
Sandingan Tujuan Daerah dengan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan

No	Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Tujuan Perangkat Daerah
1	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Kualitas pertumbuhan Ekonomi	Indeks Gini	Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa

4.2. Sasaran

Sasaran yang tertuang dalam Renstra merupakan penjabaran atas sasaran yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, yaitu :

1. *Misi ke-2*, Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan, Sasaran misi ke-2 adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.
2. *Misi ke-4* yaitu *Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa*, dengan Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi .

**Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan
Dinas Ketahanan Pangan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Daerah			
				2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Kualitas pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan daya beli masyarakat	Indeks Gini (Indeks)	0,354	0,349	0,344	0,339
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Skor)	70,23	71,23	71,73	72,23
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (Nilai)	69,77	73,16	76,56	80
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	55,89	80	82,2	86
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (Indeks)	2-3	2-3	2-3	2-3
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,47	3,49	3,51	3,53